

## Sikap Pemkot Samarinda Dipertanyakan, Jual-Beli Buku Pelajaran Masih Terjadi, Murid Merasa Diintimidasi



*Sumber gambar:*

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/08/02/4fb4f33a-b1f3-4f46-b2b9-f7d88cb6bf94-3796896903.jpeg>

Wibawa Pemkot Samarinda tengah diuji. Surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) kepada seluruh SMP dan SD negeri maupun swasta pada 1 juli lalu, tak dianggap sebagian sekolah.

**SAMARINDA-** Jual – beli buku pelajaran yang dilarang pemerintah masih saja terjadi. Ketidaktegasan Pemkot itu membuat orang tua murid geram. Setelah menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, pekan lalu, kemarin (1/8), orang tua murid menggeruduk Balai Kota di jalan Kesuma Bangsa. “Ada yang diancam anaknya tidak naik kelas” kata koordinator aksi, Nina Iskandar, menyampaikan hal yang dialami orang tua murid karena keberatan membeli buku yang diminta pihak sekolah. Lanjut dia, upaya orang tua murid juga dilemahkan dalam menyuarakan pendapat.

Di mana muncul pernyataan jika aksi yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Justru membuat para orangtua murid capek. Dalam aksi kemarin, orangtua murid membawa sederet tuntutan diikuti bukti dugaan adanya pendidik yang mengabaikan edaran Disdik Samarinda.

Menurut Nina, Surat Edaran Disdik Samarinda sudah jelas. Karena itu, dia menduga, praktik jual beli buku yang menyalahi edaran Pemkot dinilainya sudah terstruktur, sistematis, dan masif. Lagipula, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Permendikbud Nomor 2 Tahun 2008, mewajibkan sekolah menyediakan buku teks di perpustakaan dan pendidik/guru menganjurkan kepada seluruh peserta didik untuk meminjam buku teks pelajaran di perpustakaan sekolah.

Nina pun menduga, oknum pendidik di satuan sekolah yang jelas melakukan praktik jual-beli buku kebal aturan. Sebaliknya, orangtua murid mendapat ancaman serius. Dijelaskan Nina, sebelumnya orangtua murid telah mengeluhkan jual-beli buku kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Itu dibuktikan adanya laporan yang diterima dan ditindaklanjuti lewat Surat Edaran Nomor 100.4.4/7553/100.01. Namun lagi-lagi, edaran dan teguran yang dilakukan belum membuat jera para oknum tersebut. Oleh karena itu, kata dia, sejumlah tuntutan, data, dan bukti yang bakal disodorkan ke pemerintah diharapkan bisa menjadi dasar pemecatan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat. "Kami ingin kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat dipecat. Kami juga sudah sebarkan edaran dari Kadisdik, tapi hal tersebut diabaikan. Untuk pemerintah jangan takut kehilangan tenaga pendidik. Sebab, kami yakin masih banyak tenaga pendidik yang profesional, segar, dan lebih baik," sambungnya.

Tak hanya orangtua murid yang didominasi ibu-ibu, aksi kemarin didampingi Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltim. Lewat orasi yang dikemukakan Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, jual-beli buku yang dilakukan pihak sekolah jelas menyalahi aturan. Pihaknya ingin pemerintah membuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan atas permasalahan tersebut.

"Kami tahu bahwa Kadisdik (Asli Nuryadin) sudah berusaha mengingatkan, menegur, dan mencegah agar praktik ini tidak terjadi. Tapi kan kegiatan bisnis ini masih terjadi. Sampai kapan Kadisdik menjadi bempes yang kemudian menjadi korban dari oknum-oknum tersebut," ungkapnya. Jika dugaan ini masih dianggap ilusi, sambung dia, dirinya bersama tim siap mendampingi untuk bertemu korban yang mengeluhkan atas praktik tak elok tersebut.

Belum lagi soal dampak lain yang memungkinkan terjadi kepada anak. Dari laporan yang dihimpun, ada seorang anak sampai takut ke sekolah. "Karena diolok-olok. Terlebih, mohon maaf, fisiknya tidak sempurna, hingga akhirnya pihak sekolah menyatakan anak tersebut harus dibawa ke psikiater," imbuhnya.

Sekitar satu jam setengah kemudian, sepuluh perwakilan orangtua murid dipanggil masuk ke dalam ruangan Balai Kota. Mereka pun mengeluarkan seluruh unek-uneknya. Mulai dari praktik jual-beli buku, beli baju sekolah, pungutan liar untuk merenovasi sekolah, dana perpisahan untuk anak yang hendak lulus, hingga keterbukaan pengelolaan dana BOSNAS<sup>i</sup> dan BOSDA<sup>ii</sup>.

Bahkan, dari sepuluh perwakilan tersebut, ada satu komite salah satu sekolah dasar negeri yang mengaku bahwa selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana tersebut. "Saya tidak pernah dilibatkan pak terkait pengelolaan dan besarnya berapa, juga di peruntukannya untuk apa," ucap seorang ibu-ibu yang mengaku sebagai komite di salah satu sekolah dasar negeri samarinda itu.

Sementara itu, Asisten I Pemkot Samarinda Ridwan Tassa mengatakan, keluhan dan tuntutan yang disampaikan orangtua murid akan ditindaklanjuti secara serius. Terlebih mereka akan melampirkan bukti-bukti oknum yang diduga memperjualbelikan buku pelajaran. "Ini informasi yang sangat berharga. Sebelumnya kami sudah merapatkan soal ini. Dan hari ini Kamis (1/8) akan diadakan rapat kembali untuk menyusun tim khusus dalam menangani masalah ini," ujarnya.

Mulai Senin (5/8) nanti, kata dia, semua sekolah akan dikunjungi untuk memastikan dan mempertegas surat edaran tersebut dijalankan. Memastikan tidak ada pungutan liar atau sejenisnya di lingkungan sekolah. Tak hanya itu, karena ada beberapa tuntutan terdapat dugaan atas penyalahgunaan anggaran BOSNAS atau BOSDA. Lanjut dia, pihaknya akan melibatkan inspektorat untuk mengusut persoalan tersebut.

"Tentu masalah ini tidak terungkap bila ibu-ibu ini tidak datang dan memberikan informasi. Kedatangan mereka sungguh berharga dan kami sudah membuat tim. Nanti kalau bukti semua sudah didapatkan, kemu dian akan disimpulkan keputusan apa yang akan diambil," tuturnya. Saat disinggung perihal tuntutan orangtua yang ingin adanya pemecatan terhadap oknum yang melanggar edaran tersebut, pihaknya mengatakan keputusan terburuk bisa terjadi.

"Namun bila itu benar terjadi. Bisa sampai pemecatan. Kami masih menunggu data-data atau bukti yang akan disampaikan ibu-ibu ini kepada kami. Itu sangat dibutuhkan dan sebagai bahan kami untuk bisa menyusun langkah konkret ke depan," jelasnya. Di lokasi yang sama, Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, upaya untuk mencegah dan melarang jual-beli buku sudah dilakukan. Mulai dari rapat bersama pihak sekolah hingga mengeluarkan surat edaran.

"Kami yakin semua ini ada hikmahnya. Termasuk efisiensi dan pembenahan keuangan sekolah akan dilakukan, kalau cukup buku referensi bisa digratiskan," kata dia.

Untuk diketahui, sambung dia, dana BOSNAS sekolah dasar diberikan sebesar Rp900 ribu per tahun per anak. Namun, dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk buku paket atau buku wajib yang ada di sekolah. Melainkan juga untuk membeli listrik, air, dan lain-lain.

"Namun, bukan berarti buku wajib diperjualbelikan. Cukup atau tidak cukup, pihak sekolah bisa berdiskusi kepada kami, sehingga bisa terurai masalah," ucapnya. Selain itu, wali murid termasuk siswa, bisa mengakses *Platform Merdeka Mengajar* (PMM) untuk mencegah terjadinya jual-beli buku. Sebab, di *platform* tersebut juga bisa diakses murid. Di *platform*, sebut dia, ada bahan ajar, peningkatan kompetensi guru, termasuk dokumen-dokumen yang dapat diunduh sebagai bahan belajar.

"Semua sudah ada di situ, tinggal dicetak. PMM itu *platform* yang disediakan Kemendikbudristek. Kami juga sudah sosialiasikan, nanti akan kami perkuat lagi kepada wali murid. Nah, ketika *platform* tersebut banyak yang memanfaatkan, *rating*-nya naik untuk pendidikan di Samarinda juga," kata Asli. Sementara itu, demonstran berencana bermalam di pelataran Balai Kota Samarinda. Mereka sudah mempersiapkan segala kebutuhan untuk menginap di sana. Namun, setelah berdiskusi kembali bersama Ridwan Tassa, Ketua TWAP Syaparudin, alhasil massa membubarkan diri sekitar pukul 16.45 Wita. (riz)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Sikap Pemkot Samrinda Dipertanyakan, Jual-Beli Buku Pelajaran Masih Terjadi, Murid Merasa Diintimidasi, 2/8/2024
2. kaltimpost.id, Dari Demo Emak-Emak!! Jual-Beli Buku Pelajaran Masih Terjadi Murid Merasa Diintimidasi, Wibawa Pemkot Diuji, 2/8/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa Pemerintah Kota wajib mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. Pemerintah Kota membantu pengadaan sarana dan prasarana, alat dan media belajar, serta buku pelajaran bagi sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Selanjutnya dalam Pasal 181 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dijelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
3. Dalam Surat Edaran Nomor 100.4.4/7553/100.01 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Samarinda tertulis, yaitu Pendidik wajib menggunakan buku teks dan buku pendamping yang dibeli dengan menggunakan Bosnas/Bosda.

---

<sup>i</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOSNAS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar.

<sup>ii</sup> Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 Pergub Kaltim 10/2018 dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada SMAN/SMKN/SLBN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.